

ABSTRAK

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUPANG”

Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah “Bagaimana menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Kupang Tahun anggaran 2019-2023. Serta yang menjadi persoalan peneliti ini adalah: Bagaimana mengukur kinerja keuangan daerah Kabupaten Kupang menggunakan rasio keuangan daerah?

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Maka perlu diadakannya perhitungan dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, dan Derajat Desentralisasi Fiskal.

Beberapa kelemahan masih menjadi keterbatasan dari penelitian dan pembahasan ini. Keterbatasan pertama terkait dengan substansi yang dianalisis. Hampir semua analisis mendasarkan kepada kinerja keuangan APBD semata tidak mendiskusikan isu lainnya seperti kualitas belanja APBD maupun kelemahan regulasi. Keterbatasan data juga menjadi kendala dimana data yang dimiliki dari 2019-2023 memang sudah bersifat realisasi untuk dilakukan dalam penelitian selanjutnya selain upaya memperluas cakrawala pembahasan baik dari aspek non-APBD.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang

potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Kupang melalui rasio keuangan daerah .

Konsep dalam penelitian ini adalah menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kupang tahun 2019-2023 sebagai sumber informasi utama yang bermanfaat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019-2023, analisis rasio keuangan ini hanya untuk mengukur kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan, masih kurangnya penerimaan yang diperoleh berdasarkan PAD apabila dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Jika dilihat dari rata-rata, hasil rasionya adalah 16,21. Dengan Penurunan nilai rasio PAD terhadap TPD ini dan berdasarkan rata-ratanya dari tahun 2019-2023 , menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Kupang dikatakan kurang mampu dalam mengelola Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Tahun 2019 Jumlah PAD Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp. 165.449.023.461 atau sebesar 14,50 % dari Total Pendapatan Daerah. Pada Tahun 2020 Jumlah PAD Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp. 229.137.473.529 atau sebesar 19,82% dari Total Pendapatan Daerah. Pada Tahun 2021 Jumlah PAD Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp. 171.490.709.097 atau sebesar 14,66% dari Total Pendapatan Daerah. Dan Pada Tahun 2022 Jumlah PAD Kabupaten Kupang adalah sebesar Rp. 185.051.575.343 atau sebesar 15,89% dari Total Pendapatan Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa PAD kurang memiliki kemampuan dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan besarnya nilai PAD Kabupaten Kupang yang masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah setiap Tahun Anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang, Hingga menyebabkan PAD hanya memiliki pengaruh yang kecil dalam

membiyai kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kupang masih sangat bergantung pada bantuan dari pihak lain, terutama dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTT. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Kupang meningkatkan PAD-nya dengan mengembangkan potensi-potensi baru guna meningkatkan PAD Kabupaten Kupang.

Pada analisis pendahuluan digunakan metode deskriptif kuantitatif, artinya data yang diperoleh di lapangan diolah menggunakan rumus dan perhitungan sehingga memberikan data yang sistematis dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019-2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kupang belum mampu melaksanakan Otonomi Daerah (dalam hal ini Kinerja Keuangan) dengan baik.

Kata Kunci : *Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan*